UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Legalitas Netflix Sebagai Penyedia Layanan Film Streaming Berbayar Ditinjau Berdasarkan Hukum Indonesia
NOVERYAN DWI CAHYA, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku & Jurnal

Akil, 2009, *Standarisasi Manajemen Penyiaran: Mewujudkan Profesionalisme Radio & TV*, Penerbit KPID, Sulsel.

Asyhadie, Zaeni, 2010, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Bakar, Erwadi, "Pemanfaatan *Video on Demand* Untuk Pembelajaran Berbasis Web", *Jurnal*, Politeknik Negeri Padang, Vol. 9, No. 3, Oktober 2013.

Budiman, Ahmad, "Pengawasan Layanan Siaran *Video on Demand*", Puslit Badan Keahlian DPR RI, Bidang Politik Dalam Negeri, Vol. XII, No.3, 2020.

Denico, Doly, "Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran", Penelitian Bidang Hukum Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI, Vol. 4, No. 2, 2013.

Ediwarman. 2016, *Monograf Metodelogi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan skripsi, tesis, desertasi)*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Fitriani, Rini, "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis", *Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 1, Juni 2017.

Hasmiati, Ratu, "Kelebihan dan Kelemahan Media Film Sebagai Media Pembelajaran Sejarah", Jurnal, Universitas Negeri Jakarta, 2010.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Legalitas Netflix Sebagai Penyedia Layanan Film Streaming Berbayar Ditinjau Berdasarkan Hukum Indonesia
NOVERYAN DWI CAHYA, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Judhariksawan, 2010, *Hukum Penyiaran,* Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Lestariningati, Susmini Indriani, "Perancangan dan Implementasi *Video on Demand* Pada Jaringan Lokal", *Majalah Ilmiah,* Unikom, Vol. 9, No.1, 2013.

Lubis, M. Solly,1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

Lukito, Imam, 2017, *Tantangan Hukum dan Perah Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kemenkumham RI.

Prastyawan, Ragil, *Tinjauan Yuridis Bentuk Usaha Penyedia Layanan Aplikasi dan Konten Berbasis Internet,* Jurnal, Universita Airlangga, Surabaya, 2017.

Purwosutjipto, H.M.N 1982, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Simatupang, Burton Richard, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta.

Rai Widjaya, I Gusti, 2006, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Bekasi – Indonesia.

Simatupang, Burton Richard, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat*), Rajawali Pers, Jakarta.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Wahyudi, J.B, 1994, *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*, Penerbit Gramedia, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika,

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Legalitas Netflix Sebagai Penyedia Layanan Film Streaming Berbayar Ditinjau Berdasarkan Hukum Indonesia
NOVERYAN DWI CAHYA, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
g. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
h. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.
i. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE),
j. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 35/PMK.03/2019 tentang Badan Usaha Tetap (BUT).
k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin Perfilman.
l. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal.
m. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (Over the Top).

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Legalitas Netflix Sebagai Penyedia Layanan Film Streaming Berbayar Ditinjau Berdasarkan Hukum Indonesia
NOVERYAN DWI CAHYA, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

n. Siaran Pers No. 79/HM/KOMINFO/03/2018 Tanggal 22 Maret 2018 Tentang Kebijakan Afirmatif Berkeadilan Atur OTT di Indonesia.

C. Hasil Penelitian

Gusti Medina Rizkamila, *Fungsi Negara Dikaitkan Dengan Upaya Penyensoran Terhadap Layanan Film Berlangganan Melalui Media Internet*, Tesis, Universita Katolik Parahyangan, Bandung.

Hartana, *Invasi OTT (Over the Top) Terhadap Bisnis Telekomunikasi dan Arah Regulasi Pemerintah Indonesia*", Tesis, Universita Mercu Buana, Jakarta.

Resty Dhyah P., *Perlindungan Hukum Pencopta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming dan Unduh Gratis di Era Revolusi Industri 4.0*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

D. Internet

Akil, Muhammad Anshar, *Regulasi Media di Indonesia*, *https://media.neliti.com/media/publications/77392-ID-regulasi-media-di-indonesia-tinjauan-uu.pdf*.

Annur, Cindy Mutia, *KPI Ungkap Langkah Mudah Tingkatkan Pengawasan Neflix dkk*, https://katadata.co.id/berita/2020/01/16/kpi-ungkap-langkah-mudah-tingkatkan-pengawasan-netflix-dkk.

Aria, Pingit, *Poin Penting PP E-Commerce, dari Pajak hingga Aduan Konsumen*, https://katadata.co.id/berita/2019/12/05/poin-penting-pp-e-commerce-dari-pajak-hingga-aduan-konsumen.

Asmoro, Lindarto Akhir, S*ebagian Isi Perjanjian Indonesia dan Singapura*, https://pajak.go.id/id/artikel/ini-sebagian-isi-perjanjian-indonesia-dan-singapura.

Bisnis Jakarta, *DPR Kritik Faktor Penghambat Revisi UU Penyiaran*, http://bisnisjakarta.co.id/2020/01/29/dpr-kritik-faktor-penghambat-revisi-uu-penyiaran-justru-dari-asosiasi/.

Budiansyah, Arif, *Tak Bayar Pajak, Haruskah Netflix Diblokir?*

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Legalitas Netflix Sebagai Penyedia Layanan Film Streaming Berbayar Ditinjau Berdasarkan Hukum Indonesia
NOVERYAN DWI CAHYA, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200116134729-37-130494/tak-bayar-pajak-haruskah-netflix-diblokir-di-ri,

Cahyadi Hepi, *Konsensus Dunia Mengejar Pajak Google*, https://www.pajak.go.id/id/artikel/konsensus-dunia-mengejar-pajak-google.

Cahyono, Anang Sugeng, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indoesia*, https://www.jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/viewFile/79/73.

Damarjati Danu, *Multi Mux vs Single Mux di RUU Penyiaran*, https://news.detik.com/berita/d-3830163/multi-mux-vs-single-mux-di-ruu-penyiaran-baleg-dpr-masih-deadlock.

Digilib Unila, *Latar Belakang Film dan Penyiaran*, *http://digilib.unila.ac.id/4329/14/BAB%20I.pdf*.

Dwi Santo, Paulus Aluk Fajar, *Aspek Hukum Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap*, *https://media.neliti.com/media/publications/167924-ID-aspek-hukum-subyek-pajak-bentuk-usaha-te.pdf*.

Edi, Purnomo, *Belum Ada Payung Hukum Untuk awasi Netflix dan Youtube*, "https://www.merdeka.com/peristiwa/rudiantara-belum-ada-payung-hukum-untuk-awasi-netflix-youtube.html.

El Haq, Triaji Wahyu, *Begini Isi Surat Penolakan Google untuk Diperiksa*, http://news.ddtc.co.id/artikel/7863/pemeriksaan-pajak-djp-begini-isi-surat-penolakan-google-untuk-diperiksa/

Franendya, Rony, *Kenapa IndoXXI Ditutup*, *https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191227160104-37-126101/kenapa-indoxxi-ditutup*.

IMDA, *Content Code For Over-The-Top, Video-On-Demand And Niche Services*, *https://www2.imda.gov.sg/-/media/Imda/Files/Regulations-andLicensing/Regulations/Codes-of-Practice/Codes-of-Practice-Media/OTT-VOD-Niche-Services-Content-Code-updated-29-April-2019.pdf?la=en*.

Katadata.co.id , *KPI Ungkap Langkah Mudah Tingkatkan Pengawasan Neflix dkk*, https://katadata.co.id/berita/2020/01/16/kpi-ungkap-langkah-mudah-tingkatkan-pengawasan-netflix-dkk.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Legalitas Netflix Sebagai Penyedia Layanan Film Streaming Berbayar Ditinjau Berdasarkan Hukum Indonesia
NOVERYAN DWI CAHYA, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Kiswondari, "KPI Dorong Revisi UU Penyiaran Untuk Awasi *Youtube* dan *Netflix"*, https://autotekno.sindonews.com/berita/1432486/207/kpi-dorong-revisi-uu-penyiaran-untuk-awasi-youtube-dan-netflix.

Kusumapertiwi, Wahyu Nanda, *Alasan Netflix Diblokir*, https://tekno.kompas.com/read/2020/01/17/16010057/telkom-ungkap-alasan-netflix-masih-diblokir?page=all.

Media Indonesia, *Pemerintah Harus Batasi Layanan Netflix*, https://mediaindonesia.com/read/detail/286433-pemerintah-harus-batasi-layanan-netflix-di-indonesia.

Mesdiatara, Yulida, *Begini Modus Google Menghindari Pajak di Indonesia*, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3320696/begini-modus-google-menghindari-pajak-di-indonesia,

Ofcom, *Regulation of TV-like Video On demand (VOD) Services*, https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/on-demand/atvod-archives/vod-regulation.

Paulus, *Aspek Hukum Subjek Hukum Pajak Bentuk Usaha Tetap Menurut Hukum Positif Indonesia*, *paulus_afds@binus.edu*.

Prolegal.id, *Perizinan Yang Harus Dimiliki Usaha Perfilman*, https://prolegal.id/landing/2018/07/23/perizinan-yang-harus-dimiliki-usahaperfilman/

Setyaningsih, Eka, *Kontroversi Netflix*, https://www.alinea.id/nasional/kohbfhSByufgYgYuh821ey9u0-p[di]pp=w3pheaojin ntroversi-netflix-b1ZG19qHp.

Rachmadsyah, Shanti, *Membuka Kantor Perusahaan Asing*, *https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cd77f52e091f/membuka-kantor-perusahaan-asing/*.

Ramadhani, Yulaika, *IndoXXI Tutup akan Ditutup*, https://tirto.id/indoxxi-akan-tutup-1-januari-2020-penyebabnya-dari-kominfo-eoGz.

Setyaningsih, Eka, *Polemik Netflix dari Konten Hingga Pajak*, https://www.alinea.id/nasional/ko hbfhSByufgYgY uh821ey9u0-p[di]pp=w3p heaojinkontroversi-netflix-b1ZG19qHp.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Legalitas Netflix Sebagai Penyedia Layanan Film Streaming Berbayar Ditinjau Berdasarkan Hukum Indonesia
NOVERYAN DWI CAHYA, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sitompul, Josua, *Sanksi Bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi*, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt540b73ac32706/sanksi-bagi-pembuat-dan-penyebar-konten-pornografi.

Sutriyanto, Eko, *Konten Netflix Dinilai Tidak Sesuai Karakter dan Budaya Indonesia*, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/01/18/konten-netflix-dinilai-tidak-sesuai-karakter-dan-budaya-indonesia?page=2.

S&P Global, "*Singapore's Starhub and Singtel Partnership with Netflix*",https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/trending/zyj9m4qf-9kau3dwe1uvfg2.

The Guardian, "Tony Hall: regulate video streaming services or risk 'killing off' UK content", *https://www.theguardian.com/media/2018/sep/16/tony-hall-regulate-video-streaming-services-or-risk-killing-off-uk-content.*

Tribunnews, *Konten Netflix Dinilai Tidak Sesuai Karakter dan Budaya Indonesia*, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/01/18/konten-netflix-dinilai-tidak-sesuai-karakter-dan-budaya-indonesia?page=2.

UK Department for Digital, Culture, Media & Sport, *Online Harms White Paper*, Chapter 5: A regulator for online safety, *https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/793360/Online_Harms_White_Paper.pdf*.